BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait implementasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin dengan beberapa aspek yang diteliti yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek komunikasi, transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi terkait Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan optimal. Penyampaian informasi hanya berupa himbauan atau sosialisasi sesekali tanpa sistem yang terjadwal. Pesan KTR tidak tersampaikan secara jelas dan konsisten sehingga pemahaman serta kepatuhan aparatur dan masyarakat masih rendah.
2. Pada aspek sumber daya, penerapan KTR di seluruh OPD masih sangat terbatas baik dari segi staf, fasilitas, maupun dana. Tidak ada alokasi staf khusus, fasilitas pendukung hanya bersifat simbolis, dan belum ada anggaran khusus untuk kegiatan KTR. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan KTR tidak maksimal dan bergantung pada inisiatif masing-masing OPD.
3. Pada aspek disposisi, komitmen dan motivasi aparatur dalam mendukung KTR cenderung lemah dan hanya sebatas himbauan tanpa langkah nyata. Tidak ada mekanisme reward atau sanksi yang diterapkan untuk memperkuat motivasi pegawai. Seluruh OPD belum menjadikan disposisi sebagai dasar yang kuat untuk mendorong implementasi KTR secara konsisten.
4. Pada aspek struktur birokrasi, seluruh OPD belum memiliki SOP khusus dan struktur organisasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan KTR. Kebijakan hanya dijalankan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2016 tentang KTR tanpa adanya pedoman rinci atau pembagian peran yang jelas. Kondisi ini membuat koordinasi, pengawasan, dan penegakan kebijakan KTR di lapangan tidak berjalan efektif.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Merangin

Pemerintah Kabupaten Merangin disarankan memperkuat penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan membentuk satgas Kawasan Tanpa Rokok, meningkatkan komunikasi melalui pelatihan bagi petugas sosialisasi, mengalokasikan dana khusus untuk fasilitas dan SDM, memberikan penghargaan bagi OPD yang konsisten menerapkan KTR, serta segera menyusun SOP atau aturan turunan sesuai Perda No. 2 Tahun 2016 dan membentuk tim khusus di setiap OPD untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan ini.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin perlu memperkuat implementasi KTR dengan meningkatkan pelatihan sosialisasi, menetapkan SDM khusus, menyediakan anggaran, memberikan insentif bagi OPD yang patuh, serta menyusun SOP dan struktur organisasi yang jelas. Langkah ini akan memastikan kebijakan KTR berjalan optimal sesuai Perda No. 2 Tahun 2016.

3. Bagi Peneliti Lain

Peneliti lain disarankan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan KTR, seperti peran masyarakat dan efektivitas sanksi, serta melakukan studi komparatif antar daerah untuk menemukan model implementasi KTR yang efektif. Penelitian terkait dampak kebijakan KTR terhadap kesehatan masyarakat juga relevan untuk dikembangkan.